



PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA

Anugerah Christian Putra¹

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Abstrak: Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Pembahasannya sendiri adalah Dalam upaya untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan nasional, dapat dicapai dengan adanya sebuah pemberdayaan didalamnya. Terdapat berbagai macam dalam melaksanakan pemberdayaan dalam suatu wilayah salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. Kontribusi dalam PDB Indonesia tahun 2021 disumbang dari sektor UMKM sebagai penyumbang terbesar nasional. UMKM juga merupakan salah satu dari sektor usaha yang dapat bertahan dalam dalam berbagai krisis yang dialami Indonesia, yaitu pada krisis multidimensi tahun 1998, krisis global pada tahun 2008, dan krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia dan mutlak hukumnya dalam pemberdayaan sektor tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan pusat perekonomiannya di Jawa Timur, memiliki potensi yang besar dalam upaya pemerintah untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberdayakan di Kota Surabaya dapat berdampak pada kenaikan dalam perekonomian secara individu dan juga secara keseluruhan (PAD) Kota Surabaya. Sehingga untuk dapat mengetahui keterkaitan hubungan antara pemberdayaan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Surabaya, maka dilakukannya penelitian berdasarkan data-data terbaru dari sumber informasi yang terpercaya dengan variabel-variabel pemberdayaan UMKM yang meliputi Jumlah UMKM, Modal UMKM, Tenaga Kerja UMKM, dan Laba UMKM.

Kata Kunci : Pemberdayaan, UMKM, PDB, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract: *This research is descriptive qualitative by using the method of using document materials. The discussion itself is that in an effort to be able to realize success in national development, it can be achieved by the existence of an empowerment in it. In an effort to be able to realize success in national development, it can be achieved by the existence of empowerment in it. There are various kinds of implementing*



empowerment in an area, one of which is empowering MSMEs. Contribution to Indonesia's GDP in 2021 will be contributed by the MSME sector as the largest national contributor. MSMEs are also one of the business sectors that can survive the various crises experienced by Indonesia, namely the multidimensional crisis in 1998, the global crisis in 2008, and the economic crisis during the COVID-19 pandemic in 2020 until now. Therefore, the government continues to make various efforts to be able to advance MSMEs in Indonesia and it is absolutely legal in empowering the sector. The city of Surabaya as one of the cities with an economic center in East Java, has great potential in the government's efforts to be able to advance MSMEs in Indonesia. Empowered Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the City of Surabaya can have an impact on the increase in the economy individually and also as a whole (PAD) of the City of Surabaya. So to be able to find out the relationship between MSME empowerment and regional economic growth in the city of Surabaya, a research was carried out based on the latest data from reliable sources of information with MSME empowerment variables which included the number of MSMEs, MSME Capital, MSME Manpower, and Profits. SMEs.

Keywords: *Empowerment, UMKM, GDP, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pembangunan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti proses, cara, perbuatan membangun, yang berasal dari kata dasar bangun. (Deddy T. Tikson. 2005) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain daripada itu, menurut Deddy, pembangunan nasional dapat ditafsirkan sebagai sebuah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui berbagai kebijakan dan strategi untuk dapat mencapai apa yang diinginkan. Menurut para ahli seperti (Alexander. 1994) menyatakan bahwa pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang

mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa "*nation building*" menurut (Riyadi & Deddy S. 2005). Pembangunan merupakan sebuah proses natural mewujudkan cita-cita dalam bernegara untuk dapat mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera secara adil dan merata. Dalam pembangunan sendiri yang telah disampaikan oleh para ahli sebagai sebuah proses, terdapat kelanjutannya untuk dapat menuju pada

kehidupan ekonomi rakyat dengan seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, harga diri, kepercayaan diri, kreativitas, solidaritas antar sesama, dan sebuah kemerdekaan yang berfungsi sosial.

Pembangunan ekonomi sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian setinggi mungkin dalam suatu negara. Namun dalam pandangan lainnya, tujuan dari pembangunan ekonomi di setiap negara lebih ke arah terciptanya perekonomian yang bertumbuh dengan adil dan merata. Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan dan tidak akan lepas dengan pertumbuhan ekonomi yang mana dapat antar pembangunannya akan saling mendorong seperti pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara dan begitu juga sebaliknya, sehingga pertumbuhan perekonomian dapat memberikan kelancaran dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki pengertian sebuah usaha untuk dapat meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara yang berdasarkan indikator tinggi dan rendahnya pendapatan per kapitanya. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang didalamnya melibatkan perubahan yang mempengaruhi struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, sebagaimana halnya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketidakmerataan serta pemberantasan kemiskinan. Indonesia saat ini merupakan salah satu dari berbagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang yang memiliki potensi dalam pertumbuhannya di berbagai sektor dan yang paling utama dalam sektor ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang memiliki tujuan untuk dapat pemeratakan pembangunan ekonomi dan hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang.

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator dalam mengukur laju pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk dapat memproduksi sejumlah neto komoditi, baik secara material dan immaterial, termasuk dalam jasa dan sejenisnya, menurut Alfred Marshall (1890) yang merupakan seorang ahli ekonomi dari Inggris. Secara konsepnya, pendapatan nasional ini adalah penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun menurut penyampaian dari Sir William Petty dari Inggris sebagai orang yang pertama kali mencetuskan konsep pendapatan nasional, namun pernyataan tersebut tidak dapat disepakati oleh para ahli ekonomi modern yang

disebabkan menurut pandangan dalam ilmu ekonomi modern, bahwasanya konsumsi bukan satu-satunya unsur yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan negara.

PNB (Produk Nasional Bruto) merupakan alat utama dalam mengukur kegiatan perekonomian sebuah negara, yaitu terdapat keseluruhan sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahunnya oleh negara yang bersangkutan dan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Namun, PNB sendiri merupakan penambahan dari PDB dengan pendapatan neto dari luar negeri, sehingga dalam pembahasan pembangunan ekonomi di Indonesia menggunakan indikator PDB. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai total nilai atau harga pasar (*market prices*) dari seluruh barang dan jasa khir (*final goods and service*) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Sehingga indikator utama dalam mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara berdasarkan produk domestik brutonya (PDB). Dapat diambil sebuah contoh seperti, ketika dalam suatu negara PDB-nya mengalami peningkatan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perekonomian negara yang mengalami peningkatan pada PDB-nya menjadi lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mencapai peningkatan dalam perekonomian sebuah negara, maka diperlukan kerangka berpikir dalam suatu proses

pembangunan yang terdiri dari berbagai aspek yang salah satunya dalam paradigma tersebut yaitu strategi pemberdayaan. Konsep dalam pemberdayaan sebagaimana suatu konsep alternatif pembangunan, yang mana poin utama dalam konsep tersebut dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat dengan dilandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi dan demokrasi dari pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Salah satu bentuk dalam pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, yang mana dampak tersebut dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan pada pertumbuhan suatu negara juga dapat diukur dari perkembangan dunia usaha yang terdapat di negara tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) salah satu pemberdayaan baik secara langsung maupun tidak langsung sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian akan berpengaruh juga terhadap perekonomian secara nasional. UMKM selama ini selalu dapat bertahan dalam segala krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 1998 saat terjadi krisis

moneter, banyak sekali sektor usaha besar (UB) tumbang karena disebabkan, justru sebaliknya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat bertahan dari kolapsnya perekonomian saat itu. Krisis tersebut mengakibatkan perubahan dalam kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi. Sektor usaha besar satu persatu mengalami kerugian hingga kebangkrutan secara drastis karena bahan baku yang dibutuhkan diimpor yang mana harga bahan baku mengalami peningkatan secara drastis, biaya cicilan utang yang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi.

Perbankan juga mengalami keterpurukan turut serta memperparah sektor industri dari sisi permodalan usaha, sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat meneruskan usahanya karena tingkat suku bunga yang terlampaui tinggi. Namun sebaliknya yang terjadi dengan UMKM yang sebagian besar dapat melalui badai krisis tersebut, bahkan cenderung bertambah. Terdapat penyebab mengapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bertahan di tengah badai krisis ekonomi yang terjadi di sebuah negara. Secara umum, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kebanyakan menghasilkan barang konsumsi maupun jasa yang cukup dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga umumnya lebih memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, bahan baku, modal, hingga peralatan yang dibutuhkan dalam

proses produksinya, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara permodalan tidak ditopang dana dari pinjaman bank, melainkan dari dana sendiri serta sebagian besar kebutuhan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mengandalkan barang impor. Indonesia dalam membangun perekonomiannya selalu digambarkan dengan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar dari masyarakat di Indonesia memiliki taraf pendidikan yang cenderung rendah sehingga hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dalam lingkup yang cukup besar. Peranan penting Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi bagian yang sangat diutamakan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian negara yang mana dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UMKM. Melihat krisis yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, menunjukkan peran penting Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020 yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun. Di tahun-tahun sebelumnya, selama periode 2015-2019, sektor UMKM mampu untuk memberikan kontribusi dengan rata-rata

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 57,32 persen. Usaha Besar (UB) dalam periode tersebut lebih sedikit daripada UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap PDB dengan rata-rata persentase perkembangan sebesar 42,68 persen. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan selama periode tahun 2015-2019, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan rata-rata 96,60 persen tiap tahunnya dari total tenaga kerja industri di Indonesia. Sedangkan pada Usaha Besar (UB) hanya mampu menyerap sisanya sebesar 3,30 persen.

Pengertian empowerment sejatinya mengandung dua arti, yang pertama empowerment memiliki peran sebagai memberi atas kekuasaan atau mampu mengalihkan ke pihak lainnya. Sedangkan kedua dapat dipahami jika arti empowerment adalah suatu upaya untuk memberikan keberdayaan dan kemampuan kepada pihak lain menurut Priyono dan (Pranarka. 1996). Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan dimana berpusat pada manusia (Pranaka & Moeljarto ,1996 h.44). Sehingga dapat dilihat bahwasanya kapasitas manusia dalam meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dengan sumber daya materi dan non material sangat penting melalui redistribusi kepemilikan/modal. Upaya dalam mengaktualisasikan potensi masyarakat merupakan pemahaman dalam pemberdayaan

masyarakat dengan acuan empowerment. Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya yang untuk dapat mencapai kemandirian masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh mereka dengan keberadaan dua kelompok yang saling berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat yang diberdayakan dan pihak yang memberikan kepedulian kepada masyarakat lain.

Pemberdayaan masyarakat sendiri secara umum, memiliki tujuan dalam membangun daya dengan memotivasi dan memberikan dorongan serta membangkitkan kesadaran akan potensi atau daya yang dimiliki, selain itu juga upaya dalam pengembangan daya tersebut kearah yang lebih baik. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat 1999); pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya (effort) untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencakup 4 poin yaitu:

- (1) Jumlah penduduk miskin dapat berkurang yang dapat ditandai dengan semakin bertambahnya lapangan kerja dan jumlah penyerapan tenaga kerja dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin meningkat sehingga meningkatnya kesejahteraan penduduk.
- (2) Pendirian usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan tersedia yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha disertai peningkatan pendapatan yang dilakukan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta dapat diartikan sebagai kenaikan jumlah UMKM.
- (3) Dapat meningkatkan kemandirian kelompok yang dapat ditandai dengan berkembangnya usaha, semakin kuatnya permodalan, semakin sistematis administrasi kelompok, dan luasnya interaksi sosial, serta dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
- (4) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang diajukan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terpercaya atau resmi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung dengan obyek yang diteliti atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dimana data ini diperoleh dari instansi atau lembaga terkait. Data tersebut diperoleh dari buku statistik kota batu dari BPS Provinsi Jatim, dan data tersedia dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan berdasar pada statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Menurut Husaini Usman, statistik deskriptif atau statistik dalam arti sempit, ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, frekuensi, ozaiv (ogive), ukuran penempatan (median, kuartil, desil, dan persentil), ukuran gejala pusat (rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus), simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi linier.

Sehingga statistik deskriptif, yang lazim dikenal pula dengan istilah statistik deduktif, statistik sederhana, dan descriptive statistics, adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan.

Landasan Kerja Analisis

1. Variasi Statistik bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah (variasi), misalnya keadaan penduduk, keuangan, GNP, kematian, kelahiran, peserta KB dan sebagainya.
2. Reduksi Statistika bekerja secara reduksi, artinya tidak seluruh informasi yang harus diolah. Tidak seluruh orang harus diteliti (populasi), melainkan cukup dengan sampel-sampel yang mewakilinya saja. Tentu saja sampel itu harus representatif. Untuk mendapatkan sampel yang representatif diperlukan tentang teknik sampling.
3. Generalisasi Statistik induktif bekerja untuk menarik kesimpulan umum (generalisasi) yang berlaku untuk anggota-anggota populasinya berdasarkan sampel-sampel yang representatif tadi.
4. Statistik selalu berkaitan dengan angka-angka saja (kuantitatif) Statistik mempunyai angka-angka yang lebih nyata,

pasti dan dapat diukur dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari data analisis sekunder dari dokumen yang didapatkan ditemukan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah provinsi DKI Jakarta dengan urutan pertama, selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Barat diurutan ketiga. Tabel 1.1

menunjukkan bahwa dalam periode 2017-2021 kontribusi pulau jawa terhadap perekonomian nasional cenderung menurun, dengan 58,43 persen pada tahun 2018; 58,90 persen pada tahun 2019; dan 58,74 persen pada 2020. Penurunan kontribusi PDRB pulau jawa sebesar 0,16 persen poin pada tahun 2020 merupakan dampak dari penurunan kontribusi dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali DI Yogyakarta yang dapat bertahan dengan 0,88 persen dari tahun 2019 dan di tahun selanjutnya masih sama.

Tabel 1.1

Peranan PDRB Provinsi-Provinsi di Jawa, 2017-2021 (persen)

<i>Provinsi</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00
Jawa	58,38	58,43	58,90	58,74
DKI Jakarta	17,21	17,31	17,55	17,55
Jawa Barat	13,01	13,09	13,24	13,22
Jawa tengah	8,53	8,47	8,48	8,55
DI Yogyakarta	0,87	0,87	0,88	0,88
Jawa Timur	14,65	14,65	14,61	14,62
Banten	4,10	4,10	4,12	3,97

Sumber BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur, menunjukkan kontribusi PDRB Jawa Timur dalam total keseluruhan cenderung terus mengalami penurunan sebesar 0,04 persen di tahun 2018. Namun dapat bertahan di tahun 2019, dan selanjutnya selama berturut-turut mengalami penurunan sebesar 0,04 di tahun 2020 dengan penurunan 0,10

persen. Hal itu menunjukkan bahwa dampak Covid-19 sangat berimbas di setahun terakhir. Selama periode tahun 2017-2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang mana juga mempengaruhi perekonomian secara global dan terjadinya krisis ekonomi.

Tabel 1.2

*Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kota Surabaya, Tahun 2017—2020*

<i>Uraian</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
ADHB	493.026,30	538.845,46	580.488,53	554.509,46
ADHK 2010	364.714,82	387.303,94	410.879,31	390.936,42
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)				
ADHB	171.505,37	186.738,93	200.358,80	193.009,87
ADHK 2010	126.870,61	134.221,65	141.817,25	136.074,49
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,68	5,79	5,66	(4,05)
Jumlah Penduduk (000 org)	2.874,70	2.885,56	2.897,25	2.872,96
Pertumbuhan	0,43	0,38	0,41	(0,84)

Sumber BPS Kota Surabaya

Hal tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya yang selama dalam tahun 2017 sampai 2021 dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) cenderung meningkat selama 3 tahun pertama, yaitu pada tahun 2017 dengan 171.505,37 (ribu rupiah) sampai dengan tahun 2019 sebesar 200.358,80 (ribu rupiah). Namun di tahun 2020 yang mana terjadi pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan, yang mana dapat dilihat dari PDRB per kapita pada tahun tersebut sebesar 193,009.87 (ribu rupiah). Begitu

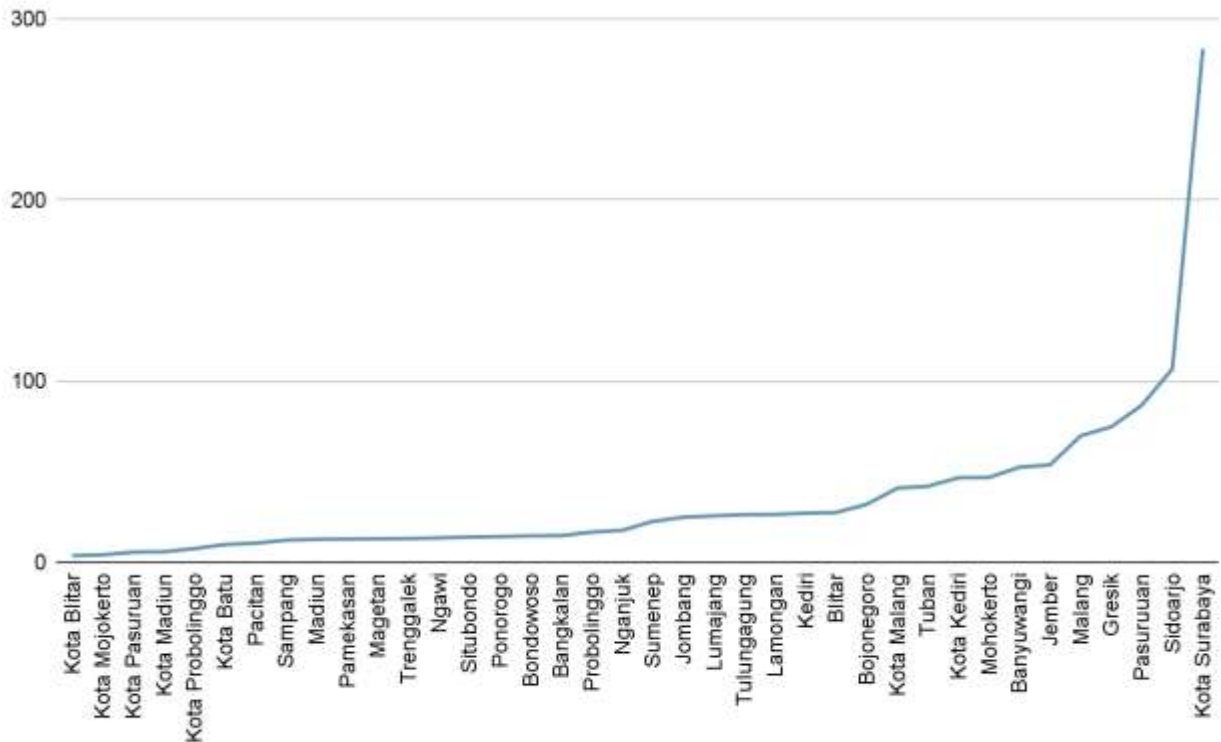
juga dapat dilihat nilai PDRB selama 4 tahun terakhir mencapai Rp. 554.509,46 miliar.

Berdasarkan dari kedua data diatas dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa timur dalam 4 tahun kebelakang cukup stabil sebelum tahun 2020 yang dimana terjadi pandemi Covid-19. Dari data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, menunjukkan kontribusi K-UMKM dalam perekonomian Jawa Timur berdasarkan

Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur tahun 2019
dijabarkan melalui grafik dibawah ini:

Grafik 1.1

Kontribusi UMKM-Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2019 (Triliun)



Melihat grafik diatas, dapat diketahui bahwa Kota Surabaya menjadi daerah tertinggi yang memberikan kontribusi dalam Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur sebesar 283,43 Triliun Rupiah. Sedangkan pada kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menyentuh angka 57%. Kontribusi K-UMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 57,26% pada tahun 2019 sebagai kontribusi tertinggi dalam 4

tahun terakhir, meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020 dan mengalami peningkatan dari tahun 2018.

Dilihat dari grafik 1.1 yang menunjukkan keseluruhan kontribusi K-UMKM di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 1.343,12 triliun rupiah dengan berdasar pada tabel dibawah yang menunjukkan bahwa kontribusi K-UMKM dengan berdasarkan pada PDRB Jawa Timur tahun 2019 sebesar 2.345,79 triliun rupiah.

Tabel 1.3

*Kontribusi K-UMKM Terhadap Produk Domestik Regional
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Triliun)*

Uraian	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)	2.019,19	2.189,78	2.345,79	2.299,46
Nilai Tambah Bruto K-UMKM	1.143,30	1.246,60	1.343,21	1.316,40
Persentase Kontribusi K-UMKM Terhadap PDRB Jawa timur	56,62%	56,93%	57,26%	57,25%

Maka dapat disimpulkan bahwa K-UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian dalam sebuah daerah, yang mana jika dilihat dari persentase kontribusi yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Jawa Timur dengan kontribusi yang melebihi 50%.

Eri Cahyadi sebagai walikota Surabaya mengembangkan UMKM dengan mengerahkan 40% *supply* dana pemerintah untuk mengembangkan UMKM demi membangkitkan perekonomian kota Surabaya

Pengembangan UMKM juga harus tersambung dengan teknologi. Dengan demikian, konektivitas antara pelaku UMKM dan pasar digital harus digalakkan. Konektivitas tersebut perlu mendapat dukungan dan perhatian dari

Pemerintah Kota Surabaya. Saat ini pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya sudah membuat aplikasi bernama e-peken. Itu adalah e-commerce yang menghimpun toko-toko kelontong dan pelaku UMKM.

Eri menyampaikan, aplikasi e-peken jadi andalan Pemkot Surabaya dalam mendongkrak perekonomian pelaku UMKM. Sejak diluncurkan Oktober 2021, transaksi di aplikasi e-commerce itu terus menanjak. Periode Januari sampai Februari, misalnya, nilai transaksi tembus Rp 3,34 miliar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan UMKM di Jawa Timur khususnya di Surabaya menjadi pemegang peran utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur melalui kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemberdayaan masyarakat usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika jumlah pengangguran meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk, hal itu akan diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja pendukung baru, seperti UMMK. Jenis UMKM ini relatif padat karya dan dapat menyerap tenaga kerja yang tidak terserap. Karena potensi alam yang menopang kota Batu, ada standar untuk pertumbuhan lingkungan bisnis bagi UMKM.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data sekunder dengan sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dalam persentase perekonomian daerah berdasarkan PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.299,46 triliun tahun 2020 dengan kontribusi nilai tambah bruto K-UMKM sebesar Rp. 1.316,40 triliun. Maka dapat dihasilkan persentase sebesar 57,25% dengan kontribusi > 50% PDRB Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membantu kemudahan akses

permodalan khususnya untuk pembinaan UMKM. Modal ini bisa diberikan secara langsung melalui koperasi-koperasi dan bank-bank pemerintah maupun melalui pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempermudah akses permodalan UMKM. Selain itu bisa dengan menambahkan peningkatan kompetensi SDM melalui penyuluhan tentang bagaimana mengelola modal yang baik. "Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain":

- (1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- (2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- (3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- (4) Terjaminnya keamanan;
- (5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Saran

Penelitian ini masih perlu dikembangkan kembali, karena masih banyak aspek-aspek yang kurang terlampir dalam penelitian ini, serta dari penelitian lebih lanjut dapat dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan manfaat kepada pertumbuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Sukirno & Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan kebijakan*. Kencana Prenada . Jakarta.

Muana Nanga. 2001 . *Makro Ekonomi Teori : Masalah dan Kebijakan (Edisi Pertama)*. Jakarta . Rajawali Press

Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi (Edisi 1 , Cetakan Ke 6)* . BPFE . Yogyakarta.

Agustini, P. 2020, October 5. *Menkominfo: UMKM Sumbang 60 persen PDB Indonesia* . Ditjen Aptika. Jakarta.

Djumena, E. 2012, March 28. *Tiga Hal Yang Buat UMKM tahan krisis*. KOMPAS.com . Jakarta.

Kontribusi UMKM TERHADAP Ekonomi Terus Meningkat: Databoks. Databoks Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. (n.d.).

Negara, D. J. K. (n.d.). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*.

Nursyamsi, A. (2021, December 17). *UMKM Penyumbang PDB TERBESAR, Tapi Belum Optimal Karena Belum Tersentuh Digitalisasi*. Tribunnews.com.

UMKM Menjadi Pilar penting Dalam Perekonomian Indonesia - kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia.

Dinas Koperasi Dan Usaha mikro. Dinkopum Surabaya. (n.d.).